



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jumat, 11 Juli 2025



## RINGKASAN BERITA HARI INI



**ABDILLAH NASHIH**  
Ketua DPRD Sidoarjo  
bicara soal Rencana  
Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah  
(RPJMD) 2025-2019

### DPRD dan Pemkab Setujui Dokumen RPJMD

Kami sudah menyelesaikan pendapat akhir fraksi-fraksi dan semuanya menyetujui dokumen di RPJMD itu menjadi dokumen perencanaan tahun 2025-2029. Ke depan menjadi tanggung jawab antara legislatif dan eksekutif untuk melaksanakan dari mulai sisi regulasinya, juga sisi penganggarnya plus pengawasannya.

## Pengurus Cabor Keluhkan Fasilitas Latihan Atlet

### DPRD Akan Evaluasi KONI Sidoarjo

SIDOARJO - Komisi D DPRD Sidoarjo mengundang sejumlah cabang olahraga (cabor) peserta Porprov Jatim IX kemarin (10/7). Sejumlah pengurus cabor mengeluh terkait fasilitas latihan hingga kesehatan atlet selama gelaran Porprov di Malang.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan cabor menyampaikan keluhan terkait minimnya dukungan dari KONI. Seperti yang disampaikan Ika Adinda Salatan dari perwakilan cabor gulat. Ika mengungkapkan kondisi fasilitas latihan gulat yang sangat minim.

"Tempat fitness *nggak* ada, padahal peralatan angkat besi itu penting untuk kekuatan atlet," ungkapnya. Selain fasilitas, keluhan lain juga muncul soal layanan kesehatan. Menurutnya



**DENGAR PENDAPAT:** Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori (kanan) menerima keluhan sejumlah pengurus cabor di ruang rapat DPRD kemarin (10/7).

### KELUHAN PENGURUS CABOR KE KOMISI D

- Fasilitas latihan atlet minim dan sulit diakses. Sehingga *training center* lebih singkat, hanya tiga bulan.
- Layanan kesehatan atlet tidak memadai saat latihan. Atlet kebingungan masalah pengobatan cedera saat latihan.
- KONI dinilai kurang perhatian dan tidak hadir saat ajang Porprov Jatim di Malang.

Sumber: Hearing DPRD Komisi D

BPJS hanya bisa digunakan saat pertandingan saja. "Ada atlet

cedera bahu, tapi *nggak* ada layanan medis. Saya usul KONI mungkin bisa sediakan klinik khusus," tegasnya.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menilai perhatian KONI kepada cabor sangat minim. "Ketua cabor merasa tidak diperhatikan. KONI kurang hadir, cabor bahkan harus menalangi biaya sendiri," katanya. Dhamroni akan segera memanggil secara resmi pengurus KONI Sidoarjo untuk evaluasi. (eza/uzi)



Bupati Sidoarjo Subandi

## Bupati Subandi Minta Ikut Awasi dan Evaluasi Kopesdes Merah Putih

SIDOARJO (BM) - Bupati Sidoarjo Subandi meminta jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hingga para camat di Sidoarjo, Jawa Timur, untuk serius melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

"Saya minta kepada para pihak terkait untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Kopesdes Merah Putih," kata Subandi dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Selasa (8/7).

Hal tersebut disampaikan Subandi saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo secara resmi menyerahkan akta pendirian dan Surat Keputusan (SK) pengesahan 346 Kopesdes Merah Putih secara simbolis yang berlangsung di Pendopo Delta

Wibawa. Ia juga mengatakan bahwa Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat menjadi modal penggerak roda ekonomi desa dan kelurahan serta dapat membawa kesejahteraan bersama.

"Koperasi ini tidak boleh hanya sekedar dibentuk secara administratif, namun benar-benar harus aktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Subandi.

Sementara itu di kegiatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Edi Kurniadi mengatakan Kopesdes Merah Putih yang dibentuk sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2025 tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan

masyarakat dalam mendorong distribusi kebutuhan pokok dan layanan jasa berbasis desa.

Ia optimis bahwa Kopesdes Merah Putih ini dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi desa dalam hal pengelolaan bahan pokok murah, apotek desa, klinik, pembiayaan simpan pinjam, serta distribusi pangan.

Edi mengatakan nantinya koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha, tetapi juga sebagai alat strategis negara dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Adanya koperasi ini juga menjadi langkah awal membangun kemandirian ekonomi desa melalui koperasi yang sehat, modern, dan berdaya saing," kata Edi. (udf)

## DLHK Tambah CCTV untuk Pantau Pembuangan Sampah Liar

KOTA-Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo terus memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah liar di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah kamera pengawasan (CCTV) di beberapa lokasi strategis.



DIWASIS: Salah titik pembuangan sampah liar yang ada di Sidoarjo.

Fanglana Satgas Ronda Sampah DLHK Sidoarjo, Suyanto Asmoro, menjelaskan bahwa pengawasan menggunakan CCTV sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu. "Pada Desember 2024, kami telah memasang CCTV di lima titik, yaitu di Ngaban, Lingkar Timur Rangkah Kidul, Lingkar Timur

Kebersari, ekuit Tol Tanggulangin, dan Jalan Kyai Mas UD," ujarnya saat ditemui pada Kamis (10/7).

Tahun ini, DLHK berencana menambah 10 titik pengawasan baru. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan minimnya pengawasan langsung serta tingginya potensi pelanggaran. "Penambahan ini untuk mendukung kinerja Tim Satgas Ronda Sampah Liar yang bertugas di lapangan," tambah Yanto, sapan akrabnya.

Tim Satgas DLHK secara rutin menyisir kawasan rawan pembuangan liar, terutama pada malam hingga dini hari. Upaya ini dinilai cukup efektif dalam menekan angka pelanggaran. (Ke Halaman 10)

## Forkopimda Gandeng Pesantren Sukseskan Ketahanan Pangan

SIDOARJO (BM) - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo bersama Pengasuh Pondok Pesantren Al Amanah Junwangi, Sidoarjo dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dukung kesuksesan ketahanan pangan nasional dengan penanaman jagung serentak di Sidoarjo, Rabu (9/7).

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa di wilayah Kabupaten Sidoarjo program Asia Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dapat terwujud oleh kolaborasi semua pihak termasuk dari elemen pondok pesantren. "Penanaman jagung serentak yang berlangsung di lahan milik Pondok Pesantren Al Amanah Junwangi ini menunjukkan bahwa pesantren pun dapat turut terlibat untuk kesuksesan program ketahanan pangan nasional," kata Subandi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo juga akan terus

memperhatikan betul ketersediaan dan harga pokok pupuk bagi para petani. Ia juga menjelaskan pihaknya akan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) bersama pemangku kepentingan terkait ke agen-agen penyedia pupuk demi memastikan ketersediaan dan harga pupuk dapat dijangkau oleh para petani.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Christian Tobing pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa penanaman jagung di Pongpes Al Amanah Junwangi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pondok pesantren lainnya untuk turut bersama-sama meningkatkan dan menyukseskan program ketahanan pangan nasional terutama di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

"Polri sebagai penggerak program ketahanan pangan, bersama pihak Fakultas Ketahanan Pangan Unesa juga siap melakukan pendampingan untuk

implementasi dari program ketahanan pangan di pondok-pondok pesantren," ucapnya.

Selain itu, Pengasuh Pongpes Al Amanah KH Nur Cholih Misbah mendukung penuh langkah positif penanaman jagung serentak tersebut.

Ia berharap pemerintah, TNI, Polri, serta para pemangku kepentingan terkait dan pihak pesantren dapat terus berkolaborasi guna mendukung program Asia Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Sidoarjo yakni Bupati Sidoarjo Subandi, Kepala Polresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Komandan Kodim 0816 Letkol Inf. Dedyk Wahyu Widodo, Wakil Dekan 2 Unesa Fakultas ketahanan pangan Ahmad Ajib R., Pengasuh Pongpes Al Amanah KH. Nur Cholih Misbah, Forkopimka Krian, kelompok tani setempat dan para santri Pongpes Al Amanah. (udf)



KETAHANAN PANGAN: Forkopimda Sidoarjo bersama Pengasuh Pondok Pesantren Al Amanah Junwangi, Sidoarjo dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dukung kesuksesan ketahanan pangan nasional dengan penanaman jagung serentak di Sidoarjo, Rabu (9/7).

## Panggil Pengurus Cabor Evaluasi Hasil Porprov

KOTA-Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan sejumlah cabang olahraga (cabor) yang mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IX di Malang Raya, Kamis (10/7). Agenda ini digelar untuk mengevaluasi hasil kontingen Sidoarjo yang dinilai gagal memenuhi target.



BUTUH PERHATIAN: Susana hearing evaluasi Porprov Jatim IX bersama para pengurus cabor.

Perwakilan cabor gulat, Ika Adinda Salatan, mengungkapkan minimnya fasilitas latihan bagi para atlet. Ia menyebut, hingga kini atlet gulat tidak memiliki tempat fitness yang layak dan hanya mendapat jatah penunstan latihan (TC) selama tiga bulan. "Tempat fitness tidak ada, padahal alat angkat

beban sangat penting untuk kekuatan fisik. Sementara daerah lain bisa melakukan TC hingga enam bulan, kami hanya tiga bulan," keluhnya di

hadapan anggota cabor. Ia juga menyoroti birokrasi rumit dalam pengu-

naan GOR, yang jus menghambat program latihan. Ia mengungkap sebelumnya fasilitas olahraga bisa digunakan lebih fleksibel tanpa proses administratif yang menyulitkan. Tak hanya soal fasilitas latihan, Ika juga menyoroti minimnya layanan kesehatan bagi atlet. Menurut

nya, BPJS hanya bisa digunakan saat pertandingan, sementara banyak cedera terjadi saat latihan. "Ada atlet yang cedera bahu saat latihan, tapi tidak mendapatkan layanan kesehatan," jelasnya.

"Saya mengusulkan agar KONI menyediakan klinik khusus untuk para atlet tambahan. (Ke Halaman 1



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



**ABDILLAH NASIH**  
Ketua DPRD Sidoarjo  
bicara soal Rencana  
Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah  
(RPJMD) 2025-2019

## DPRD dan Pemkab Setujui Dokumen RPJMD

“Kami sudah menyelesaikan pendapat akhir fraksi-fraksi dan semuanya menyetujui dokumen di RPJMD itu menjadi dokumen perencanaan tahun 2025-2029. Ke depan menjadi tanggung jawab antara legislatif dan eksekutif untuk melaksanakan dari mulai sisi regulasinya, juga sisi penganggarannya plus pengawasannya.”

# Pengurus Cabor Keluhkan Fasilitas Latihan Atlet

## DPRD Akan Evaluasi KONI Sidoarjo

**SIDOARJO** - Komisi D DPRD Sidoarjo mengundang sejumlah cabang olahraga (cabor) peserta Porprov Jatim IX kemarin (10/7). Sejumlah pengurus cabor mengeluh terkait fasilitas latihan hingga kesehatan atlet selama gelaran Porprov di Malang.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan cabor menyampaikan keluhan terkait minimnya dukungan dari KONI. Seperti yang disampaikan Ika Adinda Salatun dari perwakilan cabor gulat. Ika mengungkapkan kondisi fasilitas latihan gulat yang sangat minim.

“Tempat fitness *nggak* ada, padahal peralatan angkat besi itu penting untuk kekuatan atlet,” ungkapnya. Selain fasilitas, keluhan lain juga muncul soal layanan kesehatan. Menurutnya



AHMAD REZA/JAWA POS

**DENGAR PENDAPAT:**  
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori (kanan) menerima keluhan sejumlah pengurus cabor di ruang rapat DPRD kemarin (10/7).

### KELUHAN PENGURUS CABOR KE KOMISI D

- Fasilitas latihan atlet minim dan sulit diakses. Sehingga *training center* lebih singkat, hanya tiga bulan.
- Layanan kesehatan atlet tidak memadai saat latihan. Atlet kebingungan masalah pengobatan cedera saat latihan.
- KONI dinilai kurang perhatian dan tidak hadir saat ajang Porprov Jatim di Malang.

Sumber: Hearing DPRD Komisi D

BPJS hanya bisa digunakan saat pertandingan saja. “Ada atlet

cedera bahu, tapi *nggak* ada layanan medis. Saya usul KONI mungkin bisa sediakan klinik khusus,” tegasnya.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menilai perhatian KONI kepada cabor sangat minim. “Ketua cabor merasa tidak diperhatikan. KONI kurang hadir, cabor bahkan harus menalangi biaya sendiri,” katanya. Dhamroni akan segera memanggil secara resmi pengurus KONI Sidoarjo untuk evaluasi. (eza/uzi)

# Jawa Pos

## DLHK Tambah CCTV untuk Pantau Pembuangan Sampah Liar

KOTA-Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo terus memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah liar di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah kamera pengawas (CCTV) di beberapa lokasi strategis.

Panglima Satgas Ronda Sampah DLHK Sidoarjo, Suyanto Asmoro, menjelaskan bahwa pengawasan menggunakan CCTV sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu.

"Pada Desember 2024, kami telah memasang CCTV di lima titik, yaitu di Ngaban, Lingkar Timur Rangkah Kidul, Lingkar Timur



DIAWASI: Salah titik pembuangan sampah liar yang ada di Sidoarjo.

Kebonsari, eksit Tol Tangulangun, dan Jalan Kyai Mas UD," ujarnya saat ditemui pada Kamis (10/7).

Tahun ini, DLHK berencana menambah 10 titik pengawasan baru. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan minimnya pengawasan langsung serta tingginya potensi pelanggaran. "Penambahan ini untuk mendukung kinerja tim Satgas Ronda Sampah Liar yang bertugas di lapangan," tambah Yanto, sapaan akrabnya.

Tim Satgas DLHK secara rutin menyisir kawasan rawan pembuangan liar, terutama pada malam hingga dini hari. Upaya ini dinilai cukup efektif dalam menekan angka pelanggaran. ● Ke Halaman 10



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## DLHK Tambah CCTV...

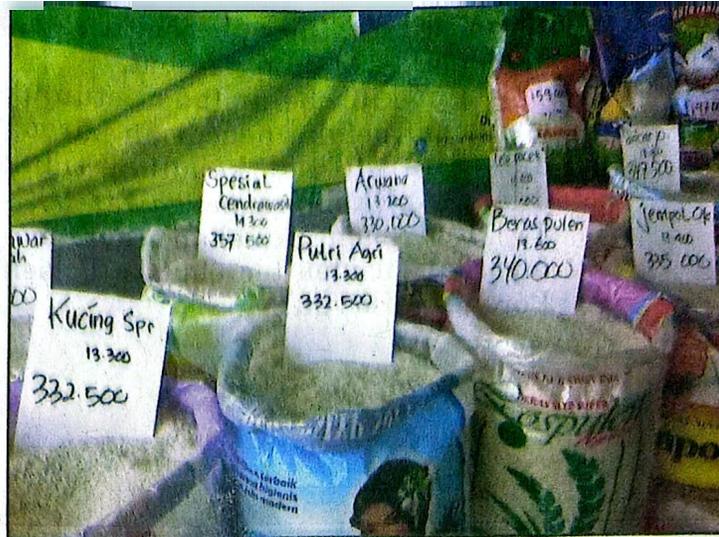
Selain pengawasan dan penindakan, DLHK juga mengencarkan edukasi kepada masyarakat. Mereka bekerja sama dengan aparat kecamatan dan desa guna meningkatkan

kesadaran warga.

Meski tegas dalam penindakan, Yanto tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Warga diimbau untuk memanfaatkan tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah tersedia di masing-masing wilayah.

“Pemasangan CCTV ini bukan semata untuk menghukum, tapi sebagai alat kendali agar warga lebih disiplin dalam membuang sampah. Kalau semua sudah sadar, tim satgas tidak perlu lagi keliling malam-malam,” pungkasnya. (sai/vga)





DIKY SANSIRI / RADAR SIDOARJO

**MELONJAK:** Sejumlah harga beras dengan berbagai merek di Pasar Larangan, Sidoarjo.

## Harga Beras Naik, Penjualan di Pasar Larangan Anjlok

CANDI-Kenaikan harga beras dalam sebulan terakhir di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sidoarjo membuat para pedagang kelimpungan dan konsumen semakin terbebani.

Di Pasar Larangan, Kecamatan Candi, harga beras premium kini tembus Rp 14.600 per kilogram (kg). Sebelumnya, harga masih berada di kisaran Rp 14.000–Rp 14.300 per kg, tergantung merek. Tak hanya itu, harga beras medium juga ikut naik dari Rp 13.100 menjadi Rp 13.400 per kg.

Kenaikan ini berdampak langsung pada volume penjualan. Iva, seorang agen beras di Pasar Larangan, mengaku penjualannya turun drastis sejak harga mulai merangkak naik.

“Biasanya saya bisa menjual hingga 20 ton per hari, sekarang hanya sekitar enam sampai tujuh ton saja,”

ungkapnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Kamis (10/7).

Menurutnya, konsumen mulai enggan membeli dalam jumlah besar karena harga terus naik tanpa alasan yang jelas. “Dampaknya, pembeli jadi berkurang,” imbuhnya.

Hal serupa disoroti Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Kabupaten Sidoarjo. Ketua HPP, Nur Hasan Zakaria, menyebut kenaikan harga ini sebagai hal yang janggal, terlebih di tengah klaim surplus produksi beras nasional yang mencapai empat juta ton.

“Ada yang tidak wajar. Kalau memang stok nasional surplus, seharusnya harga bisa stabil atau bahkan turun. Kami menduga ada permainan oleh mafia beras,” tegasnya.

Selain soal harga, Nur Hasan juga menyoroti kelangkaan

● Ke Halaman 10



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Harga Beras Naik,...

beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dari Bulog di pasar-pasar tradisional. Dalam tiga hingga enam bulan terakhir, beras SPHP yang dijual dengan harga lebih terjangkau, sekitar Rp 60.000 per lima kilogram, nyaris tidak lagi tersedia.

“Kami berharap distribusi beras

SPHP dari Bulog bisa kembali digencarkan ke pasar-pasar. Pemerintah harus hadir dan turun tangan,” ujarnya.

HPP pun mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Bulog, untuk segera mengintervensi pasar dan memastikan ketersediaan beras SPHP yang lebih terjangkau bagi masyarakat. (dik/vga)



## Panggil Pengurus Cabor Evaluasi Hasil Porprov

KOTA-Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan sejumlah cabang olahraga (cabor) yang mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IX di Malang Raya, Kamis (10/7). Agenda ini digelar untuk mengevaluasi hasil kontingen Sidoarjo yang dinilai gagal memenuhi target.

Perwakilan cabor gulat, Ika Adinda Salatun, mengeluhkan minimnya fasilitas latihan bagi para atlet. Ia menyebut, hingga kini atlet gulat tidak memiliki tempat fitness yang layak dan hanya mendapat jatah pemusatan latihan (TC) selama tiga bulan.

"Tempat fitness tidak ada, padahal alat angkat



M SAIFUL ROHMAN / RADAR SIDOARJO

**BUTUH PERHATIAN:** Suasana hearing evaluasi Porprov Jatim IX bersama para pengurus cabor.

beban sangat penting untuk kekuatan fisik. Sementara daerah lain bisa

melakukan TC hingga enam bulan, kami hanya tiga bulan," keluhnya di

hadapan anggota dewan. Ika juga menyoroti birokrasi rumit dalam penggu-

naan GOR, yang justru menghambat program latihan. Ia mengungkapkan, sebelumnya fasilitas olahraga bisa digunakan lebih fleksibel tanpa proses administrasi yang menyulitkan.

Tak hanya soal fasilitas latihan, Ika juga menyoroti minimnya layanan kesehatan bagi atlet. Menurutnya, BPJS hanya bisa digunakan saat pertandingan, sementara banyak cedera terjadi saat latihan.

"Ada atlet yang cedera bahu saat latihan, tapi tidak mendapatkan layanan kesehatan," jelasnya.

"Saya mengusulkan agar KONI menyediakan klinik khusus untuk para atlet," tambahnya.

● Ke Halaman 10



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Panggil Pengurus Cabor...

Kritik juga datang dari perwakilan cabor karate, Indrawan. Ia menyayangkan absennya Ketua KONI Sidoarjo selama pelaksanaan Porprov berlangsung. "Selama Porprov, saya tidak pernah melihat Ketua KONI hadir menyaksikan langsung atlet bertanding," katanya.

Ia berharap, KONI bisa lebih menunjukkan kepedulian terhadap para atlet dan cabor.

"Kami ingin Ketua KONI lebih peduli, hadir di tengah-tengah atlet,

serta memiliki kepemimpinan yang baik," ujarnya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menyampaikan bahwa perhatian KONI terhadap cabor memang terbilang minim. Ia menilai, banyak hal teknis dan non-teknis yang perlu segera dievaluasi.

"Ketua cabor merasa tidak memiliki dukungan, perhatian KONI sangat minim," tegasnya.

Dhamroni juga menyoroti belum cairnya anggaran bagi cabor, sehingga beberapa di antaranya harus menalangi

biaya kegiatan secara mandiri.

"Hingga saat ini anggaran belum cair. Ini juga menjadi catatan penting kami," imbuhnya.

Komisi D berencana segera memanggil secara resmi jajaran KONI Sidoarjo untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Langkah ini diambil untuk menggali penyebab kegagalan pencapaian target dalam Porprov.

"Kami akan mendalami semua masukan dari cabor, dan menjadikannya sebagai bahan utama dalam proses evaluasi kinerja KONI ke depan," pungkasnya. (sai/vga)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Bupati Apresiasi Peran Pesantren Dukung Swasembada Pangan

**SIDOARJO** - Upaya mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Sidoarjo terus digencarkan melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah strategis dilakukan dengan melibatkan pondok pesantren, sebagai bagian dari kekuatan sosial kemasyarakatan yang mandiri.

Rabu (9/7/25) sore, Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, dan Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menghadiri kegiatan penanaman jagung serentak di lahan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) milik Ponpes Al Amanah, Junwangi, Kecamatan Krian.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program penanaman jagung serentak kuartal III tahun 2025 dan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara nasional. Di Sidoarjo, pelaksanaannya dilakukan



LOETI/DUTA

Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Forkopimda Sidoarjo tanam jagung di pekarangan milik Ponpes Al Amanah, Junwangi, Kecamatan Krian Rabu (9/7/25) sore

oleh Polresta Sidoarjo bersama jajaran Forkopimda dan masyarakat pesantren.

Lahan seluas 4.800 meter persegi milik Ponpes Al Amanah ditanami jagung dan ditebar benih ikan nila di area parit sekitar lahan. Penanaman turut dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren, KH. Nur Kholis Misbah.

Bupati Subandi mengapresiasi penuh keterlibatan pesantren da-

lam mendukung program pangan nasional.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Al Mukarom KH. Nur Kholis Misbah. Kolaborasi ini membuktikan bahwa bukan hanya pemerintah, tetapi pondok pesantren juga bisa memberikan dukungan nyata agar program Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik," ungkap Bupati.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo akan terus mengawal dan mendukung program swasembada pangan, termasuk memastikan distribusi pupuk berjalan tepat waktu dan merata.

"Agen-agen pupuk tidak boleh menahan pupuk. Kami akan lakukan sidak jika ditemukan hambatan di lapangan, agar petani tidak kekurangan pupuk," tegasnya.

Bupati Subandi optimistis, jika seluruh elemen masyarakat bersinergi, termasuk lembaga pendidikan dan keagamaan seperti pesantren, maka program swasembada pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. • Loe

**DUTA**

## Moderasi Beragama



LOEFF/DUTA

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rabu sore (9/7/25),

## Deteksi Dini Potensi Konflik Sosial

**SIDOARJO** - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Merawat Kebersamaan, Meneguhkan Moderasi Beragama di Tengah Keberagaman", sebagai upaya memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial berdimensi keagamaan di lingkungan masyarakat.

Kegiatan yang dipusatkan di Aula PLHUT lantai 2, Jalan Monginsidi nomor 3 Sidoarjo, Rabu sore (9/7/25), diikuti sekitar 12 peserta dari berbagai unsur. Di antaranya Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo, Kepala Seksi Bimas Islam, Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, pranata humas, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, sejumlah ormas Islam, komunitas keagamaan, dan perwakilan media massa.

FGD tersebut membahas berbagai isu aktual, mulai dari polemik tempat ibadah yang sempat viral di wilayah Tarik, potensi bahaya ujaran kebencian di media sosial, peran penting pimpinan ormas dalam mencegah konflik, hingga perlunya pendataan dan pemetaan potensi konflik sosial di masing-masing kecamatan agar tidak meluas.

Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo, Mufi Imron Rosyadi menegaskan pentingnya sinergi antar-stakeholder untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini.

"Kita harapkan bisa memetakan wilayah mana saja yang perlu penanganan lebih lanjut agar kerukunan antarumat tetap terjaga. Itulah esensi dari FGD ini, yakni mencegah konflik sosial sedini mungkin dan menguatkan moderasi beragama di Sidoarjo," tegasnya.

Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Taufik Churrahman, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menyebut FGD menjadi wadah strategis dalam merumuskan solusi dan pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat. • Loe



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



BM/ST

Bupati Sidoarjo Subandi

## Bupati Subandi Minta Ikut Awasi dan Evaluasi Kopdes Merah Putih

**SIDOARJO (BM)** - Bupati Sidoarjo Subandi meminta jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hingga para camat di Sidoarjo, Jawa Timur, untuk serius melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

"Saya minta kepada para pihak terkait untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Kopdes Merah Putih," kata Subandi dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Selasa (8/7).

Hal tersebut disampaikan Subandi saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo secara resmi menyerahkan akta pendirian dan Surat Keputusan (SK) pengesahan 346 Kopdes Merah Putih secara simbolis yang berlangsung di Pendopo Delta

Wibawa.

Ia juga mengatakan bahwa Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat menjadi modal penggerak roda ekonomi desa dan kelurahan serta dapat membawa kesejahteraan bersama.

"Koperasi ini tidak boleh hanya sekadar dibentuk secara administratif, namun benar-benar harus aktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Subandi.

Sementara itu di kegiatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Edi Kurniadi mengatakan Kopdes Merah Putih yang dibentuk sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2025 tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan

masyarakat dalam mendorong distribusi kebutuhan pokok dan layanan jasa berbasis desa.

Ia optimis bahwa Kopdes Merah Putih ini dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi desa dalam hal pengelolaan bahan pokok murah, apotek desa, klinik, pembiayaan simpan pinjam, serta distribusi pangan.

Edi mengatakan nantinya koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha, tetapi juga sebagai alat strategis negara dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Adanya koperasi ini juga menjadi langkah awal membangun kemandirian ekonomi desa melalui koperasi yang sehat, modern, dan berdaya saing," kata Edi. (udi)

## Forkopimda Gandeng Pesantren Sukseskan Ketahanan Pangan

**SIDOARJO (BM)** - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo bersama Pengasuh Pondok Pesantren Al Amanah Junwangi, Sidoarjo dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dukung kesuksesan ketahanan pangan nasional dengan penanaman jagung serentak di Sidoarjo, Rabu (9/7).

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikannya bahwa di wilayah Kabupaten Sidoarjo program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dapat terwujud oleh kolaborasi semua pihak termasuk dari elemen pondok pesantren.

"Penanaman jagung serentak yang berlangsung di lahan milik Pondok Pesantren Al Amanah Junwangi ini menunjukkan bahwa pesantren pun dapat turut terlibat menyukseskan program ketahanan pangan nasional," kata Subandi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo juga akan terus

memperhatikan betul ketersediaan dan harga pokok pupuk bagi para petani.

Ia juga menjelaskan pihaknya akan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) bersama pemangku kepentingan terkait ke agen-agen penyedia pupuk demi memastikan ketersediaan dan harga pupuk dapat dijangkau oleh para petani.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Christian Tobing pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa penanaman jagung di Ponpes Al Amanah Junwangi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pondok pesantren lainnya untuk turut bersama-sama meningkatkan dan menyukseskan program ketahanan pangan nasional terutama di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

"Polri sebagai penggerak program ketahanan pangan, bersama pihak Fakultas Ketahanan Pangan Unesa juga siap melakukan pendampingan untuk

implementasi dari program ketahanan pangan di pondok-pondok pesantren," ucapnya.

Selain itu, Pengasuh Ponpes Al Amanah KH Nur Cholis Misbah mendukung penuh langkah positif penanaman jagung serentak tersebut.

Ia berharap pemerintah, TNI, Polri, serta para pemangku kepentingan terkait dan pihak pesantren dapat terus berkolaborasi guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Sidoarjo yakni Bupati Sidoarjo Subandi, Kepala Polresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Komandan Kodim 0816 Letkol inf. Dedyk Wahyu Widodo, Wakil Dekan 2 Unesa Fakultas ketahanan pangan Ahmad Ajib R., Pengasuh Ponpes Al Amanah KH. Nur Cholis Misbah, Forkopimka Krian, kelompok tani setempat dan para santri Ponpes Al Amanah. (udi)



BMST

**KETAHANAN PANGAN:** Forkopimda Sidoarjo bersama Pengasuh Pondok Pesantren Al Amanah Junwangi, Sidoarjo dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dukung kesuksesan ketahanan pangan nasional dengan penanaman jagung serentak di Sidoarjo, Rabu (9/7).



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

## Perkenalkan Kategori Baru Adipura

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) Kemen-LH membuat penilaian baru untuk program Adipura. Mereka kini memasukkan pengelolaan sampah sebagai salah satu penilaian Adipura. Bahkan, sistem pengelolaan sampah dan kebersihan mendapatkan porsi penilaian Adipura sebesar 50 persen.

Kemen-LH menyebutkan transformasi penilaian Adipura itu bagian penting dari agenda besar reformasi lingkungan hidup nasional.

Ini sekaligus menjawab amanat Presiden Prabowo Subianto dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Targetnya adalah mencapai 100 persen pengelolaan sampah yang layak di seluruh Indonesia pada tahun 2029.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, program Adipura tidak



RIANA SETIAWAN/JAWA POS  
Hanif Faisol Nurofiq

lagi hanya menjadi simbol kota bersih. Namun, kini menjadi indikator strategis tata kelola persampahan yang modern, adil, dan berkelanjutan. Dia menegaskan saat ini penilaian Adipura tidak hanya bersandar pada estetika kota, tetapi

pada tiga dimensi mendasar. Yaitu sistem pengelolaan sampah dan kebersihan dengan porsi 50 persen. Lalu, anggaran

dan kebijakan daerah 20 persen. Serta kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung sebesar 30 persen. Menurut dia, konsep baru itu memberikan penekanan besar pada pengurangan sampah dari sumber, penguatan peran masyarakat, serta penerapan sistem pemilahan dan daur ulang yang lebih progresif.

"Adipura kini bukan lagi sekadar penghargaan, tetapi alat perubahan," kata Hanif di Jakarta kemarin (10/7). Dia mengatakan, kota-kota yang gagal berbenah akan

diberi predikat Kota Kotor secara terbuka. Predikat Kota Kotor itu bukan hukuman, melainkan peringatan keras bahwa abai terhadap lingkungan adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan.

Dia menjelaskan, sebagai langkah konkret, seluruh kabupaten dan kota wajib mengikuti proses penilaian. Kegiatan ini akan dilakukan dengan berbasis data dan pengawasan teknologi seperti citra satelit dan survei udara. (wan/ali)

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

KEMENDES PDT

## Komitmen Berantas Buta Huruf Alquran di Desa

JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terus berkomitmen untuk memberantas buta huruf Alquran di Indonesia. Khususnya di desa-desa seluruh Indonesia. Hal tersebut dia katakan saat memberikan sambutan

dalam pembukaan pelatihan dan pembekalan 10.000 Mu'alim Alquran Majelis Taklim yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembelajaran Qiroatil Qur'an (LPQW) Indonesia di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah kemarin (10/7). "Kita lihat fakta di lapangan bahwa

sekarang yang buta huruf Alquran itu sangat banyak, 65 persen yang buta huruf alquran," katanya. Yandri menyatakan beberapa waktu yang lalu KemenDES PDT bersama Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan MoU untuk memberantas buta huruf Alquran

di Indonesia. "Tapi kita mungkin belum mengajarkannya, belum memberikan pelatihan cara belajar yang benar atau kalau pun mereka sudah belajar mungkin metode cara pembelajarannya belum tepat," ucapnya. Lebih lanjut dia mengatakan, program pelatihan 10.000

Mualim Alquran akan menjadi solusi dan tindak lanjut dari kerja sama antara KemenDES PDT dan Kemenag. Dia menilai dengan berjalannya program ini pemberantasan buta huruf Alquran akan bisa diatasi melalui Mualim dan Muallimah yang sudah dilatih. (lyn/ali)



LATIH 10 RIBU MUALIM: Mendes PDT Yandri Susanto (tengah) ingin jumlah masyarakat yang buta huruf Alquran makin tergerus.

# Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**BUAT SANDWICH:** Sebanyak 30 anak TK dari berbagai lembaga pendidikan di Sidoarjo meramaikan acara belajar memasak dalam rangkaian peringatan HAN di Perpustakaan Sidoarjo kemarin (10/7).

## Hari Anak Nasional, Murid TK Diajari Bikin Bekal Sehat di Perpustakaan

**SIDOARJO** - Dalam rangkaian memperingati Hari Anak Nasional (HAN), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Sidoarjo menggelar kegiatan belajar masak bekal bagi anak usia dini di perpustakaan kemarin (10/7).

Ada sebanyak 30 anak-anak TK dari berbagai lembaga pendidikan di Sidoarjo meramaikan acara be-

lajar masak. Kepala Bidang Pengolahan, Pelayanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Disperpusip Sidoarjo Erna Kusumawati menjelaskan, anak-anak diajak belajar membuat bekal sehat melalui panduan langsung dari seorang *chef*.

"Anak-anak diajarkan cara membuat makanan sehat dan apa saja bahan-bahan yang tergolong

makanan sehat," katanya. Pilihan bekal sehat yang diajarkan adalah *sandwich*. Menu itu dipilih karena banyak anak-anak yang tidak suka makan nasi.

"Kami ingin menanamkan kebiasaan membawa bekal yang sehat dan mengurangi jajanan yang tidak sehat di luar rumah," ujarnya. **(eza/uzi)**

# Jawa Pos

## Perbatasan Sidoarjo-Surabaya di Waru Bakal Dipercantik

**SIDOARJO** - Pemkab Sidoarjo akan mengubah wajah kabupaten di perbatasan Sidoarjo-Surabaya di Waru. Gerbang masuk baru akan lebih tertata dan representatif.

Bupati Sidoarjo Subandi mengungkapkan, salah satunya dimulai dari penataan kawasan gerbang masuk. "Wajah baru di perbatasan ini akan menjadi simbol kebanggaan dan identitas daerah," katanya kemarin (10/7).

Subandi menyebut, desainnya dari gerbang masuk di perbatasan akan menyesuaikan karakter Sidoarjo. "Kami ingin nantinya tampilan menyesuaikan apa yang khas dari Sidoarjo," ungkapnya. Pembangunan

tersebut juga diharapkan bisa memberi kesan pertama yang baik bagi masyarakat luar kota.

Subandi ingin Kota Delta terlihat lebih tertata dan menarik. "Gerbang masuk Sidoarjo ini dapat menjadi ikon baru yang menyambut hangat siapapun yang datang," ujarnya. Menurutnya pembangunan tahap awal akan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Hal tersebut dilakukan sambil menyiapkan proses pembangunan selanjutnya. "Ya karena ini juga ada kegiatan lain yang berjalan yang harus kita lakukan. Kita mencoba menggunakan anggaran CSR dulu," jelasnya. (eza/uzi)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

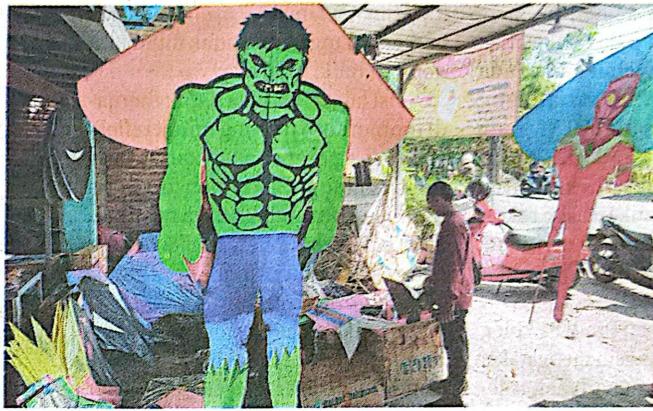
**DITATA ULANG:** Monumen di pintu masuk Sidoarjo dari arah Surabaya di Waru kemarin (10/7). Gerbang masuk Sidoarjo itu akan dipercantik.

## Perajin Layang-Layang di Wonoayu Banjir Pesanan Selama Musim Libur

**SIDOARJO** - Musim liburan dan menjelang kemarau jadi berkah. Sejumlah perajin layang-layang asal Desa Simo Angin-Angin, Kecamatan Wonoayu, kebanjiran pesanan beragam layang-layang hingga puluhan ribu biji per hari.

Salah satu perajin, Ahmad Rifai mengatakan, lonjakan permintaan paling besar terjadi pada jenis layangan untuk aduan. "Kalau dibanding tahun lalu, layangan aduan naik sampai 300 persen," ungkapnya kemarin (10/7).

Menurutnya dalam sehari penjualan layangan aduan



**BERAGAM JENIS:** Salah satu layangan hias yang dijual Ahmad Rifai di tokonya di Desa Simo Angin-Angin, Wonoayu, kemarin (10/7).

eceran bisa tembus 100 buah. Sementara untuk pembelian grosir, jumlahnya bisa lebih dari puluhan ribu

layangan per hari. "Banyak yang beli borongan, buat dijual lagi ke luar kota," kata pria 27 tahun itu.

Rifai menjelaskan, jenis layangan yang paling laris tahun ini adalah papiran, sawangan, dan aduan. Sementara untuk layangan hias, penjualannya cenderung stabil dibanding tahun lalu.

Pesanan layangan tak hanya datang dari sekitar Sidoarjo. Konsumen juga berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Probolinggo, Surabaya, hingga kabupaten-kabupaten lain. "Musim liburan begini, antusias masyarakat main layangan memang tinggi, bukan hanya anak-anak saja," tuturnya. (eza/uzi)

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## SD-SMP Gratis Butuh Rp183,4 T, untuk Swasta Bertahap

**JAKARTA** - Sekjen Kemdikdasmen Suharti telah menghitung untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa biaya SD-SMP swasta digratiskan. Suharti mengatakan pemenuhan sekolah gratis akan dilakukan bertahap.

“Ini usulan prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama, pertama bahwa pemenuhan dilakukan secara bertahap, kemudian pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan kualitas,” kata Suharti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Rapat

“ BACA : SD-SMP .., hal 11

**DUTA**



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Kemdikdasmen Usul Tambah Anggaran Rp 71,11 T

■ Sambungan dari Hal 1

**SD-SMP**

juga dihadiri

Suharti mengatakan telah melakukan rapat bersama Menko PMK dan Menteri Agama serta berkomunikasi dengan badan dan lembaga pendidikan swasta. Anggaran saat ini belum dapat membiayai keseluruhan sekolah negeri dan swasta. Sebab itu, dia mengusulkan agar tahapannya dilakukan dengan batas-batas tertentu.

Suharti lalu menjelaskan kriteria sekolah swasta yang perlu dibiayai. Untuk sekolah swasta yang masih mendapatkan pembiayaan dari masyarakat, diusulkan untuk tetap dibiayai investasi yang didukung melalui revitalisasi sekolah. "Tentu saja, karena kita tentu saja menginginkan kualitas yang lebih baik, maka pelatihan-pelatihan guru tetap mendapatkan tambahan pembiayaan," katanya.

Kemudian untuk biaya operasional personel supaya ekuivalen dengan yang diterima sekolah swasta, kata Suharti, simulasi terakhir menggunakan median dari guru-guru yang ada sekarang. "Menggunakan satuan biaya untuk guru golongan IVA dengan masa kerja 5 tahun, tambahan TPG (Tunjangan Profesi Guru) disesuaikan dengan anggaran tersebut," sambungnya.

Kemudian, untuk nonpersonel, diusulkan penyesuaian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hal itu, menurut dia, agar dapat mencakup pembiayaan kegiatan-kegiatan yang belum terbiayai dari dana BOS, termasuk ekstrakurikuler. "Kemudian untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kita berikan kepada keluarga

yang tidak mampu," ucapnya.

Lebih lanjut, Suharti mengatakan dari simulasi yang telah disampaikan itu, dibutuhkan total Rp 183,4 triliun untuk sekolah swasta maupun negeri. Dia mengatakan hal itu telah dihitung menggunakan sejumlah pendekatan.

"Namun kita tahu bahwa guru-guru di sekolah negeri masih juga yang statusnya non-ASN, yang butuh juga dukungan. Karena ketika nanti sekolah swasta diberikan penganggaran dengan satuan biaya tertentu, tentu yang di sekolah negeri yang belum mencapai tersebut akan menuntut untuk mendapatkan hak yang sama," sambungnya.

Sebab itu, menurut dia, selain kebutuhan tambahan swasta, diusulkan juga penambahan untuk negeri. Dia mengatakan kebutuhan itu telah dihitung dan dibagi untuk 5 tahun ke depan.

"Jadi kalau dihitung-hitung satuan biaya rata-rata untuk yang SD negeri sekitar Rp 8,3 juta. Untuk SMP Rp16 juta. Tapi untuk keseluruhan, untuk swasta ada kebutuhan tambahan sekitar Rp 5,9 juta untuk yang SD dan Rp 7,7 juta untuk SMP," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X My Esti Wijayati meminta agar pelaksanaan putusan MK telah dianggarkan pada 2026. Dia menegaskan agar putusan MK tidak terlewat.

"Jadi jangan sampai putusan MK lewat begitu saja di anggaran 2026, dengan skema yang sudah diberikan oleh Bu Suharti menyampaikan tadi, kita bisa melewati tahapan-tahapan, tapi tahapan yang harus segera dilaksanakan di titik yang mana kita sudah bisa menentukan untuk anggaran 2026," imbuhnya.

**Usul Tambah Anggaran Rp 71,11 T**

Pada rapat tersebut, Mendikdas-

men Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp 71,11 triliun. Abdul Mu'ti mengatakan penambahan anggaran itu, salah satunya untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun.

Abdul Mu'ti awalnya mengatakan pagu indikatif anggaran 2026 Kemendikdasmen sebesar Rp 33,65 triliun. "Dengan demikian, tambahan anggaran yang diusulkan menjadi sebesar Rp 71,11 triliun sehingga total anggaran yang kami usulkan dalam pagu anggaran menjadi Rp 104,76 triliun," tuturnya.

Usulan anggaran tersebut, menurut Abdul Mu'ti, juga untuk memenuhi putusan MK yang meminta SD-SMP swasta digratiskan. Namun Abdul Mu'ti mengatakan pemenuhan sekolah gratis itu hanya dapat dilakukan secara bertahap. "Anggaran yang kami rancang untuk pemenuhan putusan MK terutama kaitannya dengan pendidikan bagi negeri dan swasta," katanya usai rapat.

Usai rapat, Abdul Mu'ti mengatakan usulan tersebut telah disetujui oleh Komisi X DPR RI. Dia mengaku bersyukur atas kesepakatan itu. "Alhamdulillah usulan kita untuk penambahan anggaran dapat setuju oleh Komisi X," ucap dia.

Abdul Mu'ti berharap, dengan usulan penambahan anggaran itu, akan terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dari berbagai jenjang. Namun dia mengatakan penerapan sekolah swasta dan negeri gratis tak dapat dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

"Tapi paling tidak dukungan DPR untuk anggaran ini menjadi bagian penting dari upaya kita untuk dapat memberikan pemenuhan layanan pendidikan untuk semua," sambungnya. ●  
kim, dit

**DUTA**



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## DPRD Kabupaten Sidoarjo Gandeng Bappeda Gelar Konsultasi Publik Rancangan Perda RPJMD 2025-2029



Zonajatim.com, Sidoarjo – DPRD Kabupaten Sidoarjo menggandeng Bappeda Pemkab Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Akhir Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029, Sabtu (5/7/2025), bertempat di Ruang Rapat Pembangunan 1 dan 2 Bappeda Sidoarjo.

Kegiatan ini, yang merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelibatan publik dalam perencanaan pembangunan, menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan. Legislatif, akademisi, praktisi, hingga organisasi masyarakat hadir untuk menyampaikan masukan berharga. Mendorong Partisipasi Publik untuk Pembangunan yang Adil.

Forum ini juga dihadiri oleh unsur DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, insan media dari beberapa organisasi, akademisi, kelompok tani, serta berbagai organisasi masyarakat LSM. DPRD dan Pemkab menjaring aspirasi krusial demi pembangunan inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Abdillah Nasih, menegaskan pentingnya forum seperti ini untuk memastikan bahwa pembangunan lima tahun ke depan tidak hanya menjadi domain eksekutif dan legislatif. "Kami dorong Pansus RPJMD untuk menggelar forum konsultasi bersama masyarakat. Karena tidak adil jika pembangunan Sidoarjo dimonopoli," tegas Nasih politisi PKB, usai Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo pada 1 Juli 2025.

Penegasan ini menggarisbawahi komitmen untuk memastikan pembangunan Sidoarjo yang partisipatif dan tidak terpusat. Forum ini menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan—dari legislatif, akademisi, praktisi, hingga organisasi masyarakat—untuk menyampaikan aspirasi dan masukan.

DPRD dan Pemkab Sidoarjo berharap dapat menyempurnakan dokumen RPJMD sebelum diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), sebagai langkah mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Pelibatan partisipasi publik sangat diharapkan dalam pembahasan akhir RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025-2029, terkait 14 program prioritas Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo periode 2025-2029 sebelum ditetapkan menjadi Ranperda.

Kepala Bappeda Sidoarjo, Heri Soesanto, membuka acara dengan menekankan urgensi partisipasi publik dalam merumuskan visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan yang tercantum dalam 14 program prioritas. "Acara ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelibatan publik dalam perencanaan pembangunan, menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan. Legislatif, akademisi, praktisi, hingga organisasi masyarakat hadir untuk menyampaikan masukan berharga," papar Heri Soesanto saat membuka Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025 -2029.

Masukan strategis juga datang dari Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H Suyarno SH, MH, yang menggarisbawahi pentingnya kesinambungan program dan pengelolaan anggaran secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik.



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Suyarno berikan paparan

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno dalam paparannya mengatakan, RPJMD merupakan roh atau nyawa pemerintahan daerah dalam menjalankan kewajibannya untuk mengelola pemerintahan daerah lima tahun ke depan sesuai visi-misinya. Ini yang menjadi tolok ukur bahwasanya sejauh mana RPJMD itu diharapkan bisa mengakomodir semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat Sidoarjo.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

"Keberhasilan pembangunan di Sidoarjo itu tergantung pada rencana pembangunan yang sudah direncanakan. Itu sesuai dengan Visi-Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih. Jadi RPJMD berasal dari masukan semua elemen masyarakat, stakeholder. Kita berharap masukan atau pelibatan masyarakat dalam pembangunan Sidoarjo," ujar Suyarno.



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno SH

Secara umum Suyarno menjelaskan bahwa, sasaran RPJMD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Karena menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan skala prioritas dalam RPJMD, selain itu, meningkatkan kualitas infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan. "Jadi dengan RPJMD tentunya mendorong semua kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat secara adil makmur dan sejahtera," pungkask politisi PDIP ini.

Selanjutnya, Ketua Pansus RPJMD 2025-2029 DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto dan Wakil Ketua Pansus Moch Dhamroni Chudlori secara bergantian membacakan 14 program prioritas Bupati-Wakil Bupati yang menjadi visi – misi dalam lima tahun ke depan yang terangkum dalam RPJMD.

Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Sidoarjo mempresentasikan 14 program unggulan yang dirancang untuk menjadi solusi konkret terhadap berbagai persoalan daerah. Program-program ini menargetkan isu-isu vital seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan layanan, dan daya saing daerah.



**Zonajatim.com**  
**Zonajatim.com**



# INFO MEDIA PERS

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dari 14 program prioritas inisiatif, sebanyak 7 program yang dipaparkan Ketua Pansus RPJMD, H. Tarkit Erdianto, SH, MH antara lain Penciptaan 100.000 lapangan kerja baru, Layanan berobat gratis untuk warga Sidoarjo, Program makan bergizi gratis bagi lansia, Penyediaan 20.000 beasiswa kuliah, SD, SMP untuk anak yatim, Distribusi 2.000 paket pupuk & benih gratis bagi petani dan nelayan, Pemberian 50 juta modal usaha untuk UMKM, Alokasi 500 juta per desa/kelurahan untuk BKK dan insentif perangkat desa.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis. "Karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, tentunya dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki," ujarnya.



Tarkit Erdianto

Politisi PDIP ini menyampaikan, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. "Ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting," kata Tarkit Erdianto.

Diantaranya, lanjutnya, presentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan. "Selain itu presentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD juga penting. Serta presentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan juga merupakan hal yang penting," pungkasnya.

Wakil Ketua Pansus RPJMD Dhamroni mengatakan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 tahunan yang berisi penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah.

RPJMD dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan di daerah. "Forum Konsultasi Publik Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 merupakan media untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan," kata Dhamroni Chudlori politisi PKB ini.



**Zonajatim.com**  
**Zonajatim.com**



# INFO MEDIA PERS

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Oleh karenanya, semua pihak perlu menyamakan persepsi dan tindakan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi materi, sinergis dan membangun keselarasan, serta satu kesatuan perencanaan dan penganggaran, melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.

"Saya berharap, kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 dapat melahirkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo," katanya.



Lebih lanjut, dikatakan kegiatan ini dilakukan guna terwujudnya masyarakat Kabupaten Sidoarjo Yang Aman, Maju, Inklusif, Berdaya Saing, Berbudaya dan Berkelanjutan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

Selanjutnya Wakil Ketua Pansus Dhamroni Chudlori menyampaikan 7 program inisiatif yakni peningkatan kapasitas 20.000 UMKM naik kelas, Pembangunan 3 dinas baru (penataan kota, PDAM, transportasi) dan pengadaan bus sekolah gratis, Kenaikan tunjangan 100% untuk tenaga kesehatan, guru ngaji, GTT, dan honorer, Pengembangan pusat kreativitas pemuda dan desa wisata, dengan konsep satu desa satu duta wisata, Renovasi 2.000 warung rakyat, kemudahan perizinan usaha melalui konsep Smart City, Revitalisasi taman kota dan perumahan.

"RPJMD Sidoarjo harus solutif dan tidak sekadar normatif. Fokus utamanya adalah menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat," papar Ketua Pansus Tarkit dan Waket Pansus Dhamroni.

"Melalui forum konsultasi publik ini, DPRD dan Pemkab Sidoarjo berharap dapat menyempurnakan dokumen RPJMD sebelum diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Langkah ini krusial dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan di Sidoarjo," pungkasnya.

Baik Ketua maupun Wakil Ketua Pansus RPJMD menegaskan bahwa RPJMD tidak boleh sekadar normatif, melainkan harus solutif dan menjawab persoalan nyata seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan layanan pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya daya saing daerah. sp/adv

**Zonajatim.com**



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Polri Pimpin Tanam Jagung Kuartal III Serempak 2025, DPRD dan Bupati Sidoarjo Siap Sidak Pupuk Mahal dan Langka

Kamis, 10 Juli 2025 | 09:04 WIB



*Polri pimpin tanam jagung nasional. Bupati & DPRD Sidoarjo siap sidak pupuk mahal demi swasembada pangan 2025. Foto: Istimewa*

**Ruang.co.id** – Tekad Swasembada pangan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terus dilakukan, setelah sukses pada kuartal I dan II di tahun 2025. Kini penanaman Jagung Kuartal III dan penanaman Jagung di lahan Perhutanan Sosial berlangsung secara serempak nasional, secara simbolis dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, disiarkan langsung secara hybrid pada Rabu siang (9/7/2025).

Kapolri memimpin penanaman jagung kuartal III di wilayah Hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

Penanaman Jagung kuartal III secara nasional, saat ini dilakukan pada lahan dengan total luas 168.432,23 hektare.



Terdiri dari 117.510,29 hektare lahan perhutanan sosial yang sudah ditanami, serta 48.082,40 hektare lahan produktif, dan 2.839,54 hektare lahan perhutanan sosial.

Berdasarkan data hingga 8 Juli 2025, terdapat potensi lahan untuk ditanami jagung seluas 795.339,53 hektare. Dengan rinciannya seluas 301.672,049 hektare lahan di antaranya merupakan lahan perhutanan sosial, sedangkan yang telah ditanami seluas 431.233,36 hektare. Adapun Jagung yang ditanaminya, jenis hibrida lokal varietas unggul.

Penanaman Jagung itu tidak terlepas dengan kolaborasi bersama Inhutani dan Perhutani serta antar-stakeholder, kementerian, Bulog, dan lembaga terkait.

Selain penanaman jagung, Polri saat ini juga membangun 18 gudang pangan Polri di 12 provinsi dengan total kapasitas penyimpanan mencapai 18.000 ton.

Turut dihadiri dalam Penanaman Jagung serempak nasional ini, diantaranya Ketua Komisi IV DPR – RI Siti Hediati (Titiek) Soeharto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni.

Penanaman jagung secara serempak juga berlangsung di Kabupaten Sidoarjo. Di lahan seluas 1 hektare milik yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Amanah di Desa Junwangi, Kec. Krian, penanaman Jagung secara simbolik dipimpin oleh Kapolresta Sidoarjo, Kombes. Christian Tobing.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Bupati Sidoarjo Subandi, Abdillah Nasih Ketua DPRD, M. Nizar Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo sebagai pemangku wilayah Dapil (Daerah Pemilihan)nya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Dandim 0816 Letkol Inf. Dedyk Wahyu Widodo, Wakil Dekan II Fakultas Ketahanan Pangan Unesa Ahmad Ajib R., Pengasuh Ponpes KH. Nur Cholis Misbah, Forkompimda, Forkopimka, kelompok tani, serta para santri pondok.

Di kesempatan sambutannya, Bupati Subandi menyinggung soal ketersediaan pasokan pupuk dari pemerintah pusat, yang mengalami kelangkaan dan harganya melambung, yang kerap dikeluhkan oleh para petani.

'Informasi yang saya dapatkan, ternyata agen – agen pupuk yang ada di kabupaten Sidoarjo tidak menjalankan instruksi dari Kementerian Pertanian,' ungkap kesal Bupati Subandi.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

"Coba nanti kita sidak (inspeksi mendadak) bersama (stakeholder), biarkan masyarakat pertanian di Sidoarjo ini tidak lagi kekurangan pupuk," imbuh geramnya.

Bupati Subandi juga memerintahkan Kapolresta dan Dandim beserta Dinas Pertanian, untuk menindaklanjutinya.

Bahkan Ia memerintahkan secara khusus terhadap para Kapolsek dan Danramil, untuk intensif melakukan pengecekan dan mengawal penuh distribusi pupuk di agen – agen pupuk, guna memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai aturan.

Acara penanaman Jagung serempak termasuk berlangsung di Sidoarjo ini, mendapat apresiasi penuh dari Abdillah Nasih, Ketua DPRD Kab. Sidoarjo.

Dengan didampingi M. Nizar, Cak Nasik sapaan akrabnya, mengatakan dengan kolaborasi Polri dan di tingkat daerah Kapolresta bersama pondok – pondok pesantren di Kab. Sidoarjo, harapan DPRD semakin yakin gerakan swasembada pangan secara nasional, termasuk kebutuhan swasembada pangan di Sidoarjo dapat lebih cepat terealisasikan.

"Dan kami dari DPRD Insya Allaah terus memback-up baik secara kebijakan maupun penganggaran, bila memang dibutuhkan oleh para petani maupun pesantren di Sidoarjo," ujar cak Nasik.

Pengasuh Ponpes Al Amanah Junwangi mengaku bersyukur dengan kolaborasi Polresta bersama Forkompimda Sidoarjo dalam menanam Jagung di lahannya.

KH. Nur Cholis Misbah pengasuh Ponpes yang memiliki luas lahan sekitar 40 hektare ini mengatakan, kehadiran Bupati, Kapolresta, DPRD, Kehakiman, dan Kejari merupakan berkah bagi ponpesnya.

"Semoga ini menjadi simbol kebersamaan pesantren dengan para pejabat daerah, (juga) kebersamaan masyarakat dengan pejabat. Dengan kebersamaan ini, maka masyarakat akan lebih produktif dalam menjalani hidup," ujar sang kyai.

Semangat kolaborasi yang harmoni terus diwujudkan dari desa – desa di seluruh daerah untuk menanam Jagung di kebun kita, terus menyalakan gerakan ketahanan pangan nasional dan dapat menggapai sukses swasembada pangan nasional.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Usai Porprov 2025 Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Menggelar Hearing Bersama Pengurus Cabor, Ada Apa ?

RedSidoarjo © Juli 11, 2025



Liputan5news.com - Sidoarjo. Usai digelarnya Porprov ke IX tahun 2025 di Malang Raya, Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama pengurus cabang olah raga (Cabor). Hal ini dipicu oleh kegagalan kontingen Kabupaten Sidoarjo untuk memenuhi target.

Mayoritas Cabor yang berlaga di Porprov 2025, seperti "anak ayam kehilangan induknya".

Ini tergambar jelas dari keluhan pengurus Cabor yang ada, saat mereka berdialog dalam wadah hearing dengan komisi D DPRD Sidoarjo, Kamis (9/7/2025).

Hearing yang diikuti seluruh komisi D itu, menjadi ajang curhat bagi ketua Cabor akan kondisi prihatin mereka baik sebelum bertanding hingga usia Porprov digelar.

Seperti yang disampaikan ketua Cabor Wushu Nita Dariyanti, yang terang-terangan menyebut Cabor seperti tidak punya orang tua (KONI).

Bagaimana tidak, saat dirinya rela menepis tawaran 2x bonus ratusan juta untuk satu emas dari daerah lain dan lebih memilih bertahan untuk Sidoarjo, ternyata yang didapat malah Zong alias sikap acuh dari KONI Sidoarjo.

"Bahkan untuk sekelas konsumsi saja, kita baru dapat dana di hari keempat Porprov. Itupun anggarannya turun tidak sesuai pengajuan," ujar Nita.

Tidak hanya itu, menurut mantan atlet yang kini menjadi pengusaha catering ini, perhatian KONI akan dinamika lapangan di Porprov juga tidak ada bahkan cenderung tidak peduli



Sehingga ketika diperlukan upaya lobi untuk mempertahankan kemenangan, tidak ada sama sekali suportnya dari KONI.

Selain dari Cabor Wushu, keluhan serupa juga disampaikan dari Cabor Karate.

Bahkan Awan ketua Cabor karate secara tegas menyebutkan ketua KONI saat ini sangat sulit dihubungi dan terbilang pelit.

"Makanya kalau pilih ketua KONI yang mumpuni. The right man on the right place" ujar Awan.

Bahkan banyak Cabor yang secara terang minta Imam Mukri ketua KONI sekarang diganti atau mundur

Selain mengeluhkan pengurus KONI saat ini yang terbilang kurang perhatian terhadap Cabor, dalam hearing evaluasi ini juga banyak keluhan seputar sarana dan prasara yang kurang maksimal saat TC.

Ika adinda dari Cabor Gulat, mengeluhkan minimnya fasilitas kesehatan ketika pelaksana TC.

Seperti satu bulan sebelum pelaksanaan Porprov, banyak atlet Gulat yang cedera otot bahkan tulang, ternyata fasilitas massage atau terapi tidak ada sama sekali.

"BPJS ketenagakerjaan hanya menghandle berobat waktu pertandingan. Karena fasilitas kesehatan dari KONI tidak ada, akibatnya para atlet yang cidera berobat keluar dengan biaya sendiri," ujar Ika yang juga meminta ad fasilitas fitnes yang memadai untuk atlet Gulat.

Sementara itu ketua komisi D DPRD Sidoarjo H.Damroni Chudlori menyatakan seluruh keluhan dari Cabor ini, akan menjadi bahan untuk disampaikan ke bupati Sidoarjo.

"Menjadi PR kita semua untuk bisa mencetak alit yang bagus dan mumpuni dengan menumbuhkan rasa memiliki Sidoarjo. Kalau saya boleh menyatakan, seharusnya pengurus KONI juga diisi oleh pengurus Cabor yang mendapatkan mendali," ujar Damroni.

Seperti diketahui, kontingen Kabupaten Sidoarjo yang berkekuatan 1.322 atlet dengan mengikuti 67 disiplin olahraga gagal memenuhi target.

Surabaya tampil sebagai juara umum untuk ke sembilan kalinya berturut-turut dengan membawa pulang 195 mendali emas, 127 medali perak dan 134 medali perunggu.

Kontingen Sidoarjo dengan sokongan dana sebesar-besar Rp 16,5 miliar ini hanya menempati posisi ke tiga di bawah Surabaya dan Kota Malang.(Yanti)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Warih Andono, SH Wakil Ketua DPRD Kab Sidoarjo Apresiasi Satpol PP Dan Bea Dan Cukai Dalam Menindak Dan Memberantas Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Sidoarjo



Warih Andono, SH Wakil Ketua DPRD Kab Sidoarjo saat memberikan arahan pada warga desa sedati (nyo)

**SIDOARJO, KRJATIM.COM.**-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Apresiasi Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Bea cukai dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap toko kelontong yang menjual rokok tanpa cukai serta perusahaan rokok tanpa menggunakan cukai atau menggunakan cukai palsu. Hal itu disampaikan Warih Andono, SH Wakil Ketua DPRD Kab Sidoarjo pada koranrakyat usai menghadiri Sosialisasi Ketentuan Perundang Undangan Di bidang cukai dalam rangka Pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 bertempat di Balai Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kab Sidoarjo Kamis (10/7) 2025. Hadir dalam sosialisasi Karyono mewakili Satpol PP, Dua orang anggota DPRD Kab Sidoarjo serta dua orang dari Bea Cukai.

Dikatakan Warih memang rokok tanpa cukai alias menggunakan cukai palsu harganya cukup murah. Sehingga sangat membahayakan, bila rokok itu disedot atau dibeli anak anak, karena harganya sangat terjangkau." Bayangkan sepuluh ribu sudah bisa membeli rokok ilegal itu." Ujarnya.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Warga Desa sedati mulai dari RT, RW serta tokoh masyarakat saat mengikuti kegiatan sosialisasi (nyo)

Tentunya dengan adanya rokok tanpa cukai itu akan sangat merugikan masyarakat khususnya dalam hal kesehatan. Selain itu akan merugikan negara, karena dengan adanya rokok tanpa cukai negara tidak memperoleh pajak dimana, pajak tersebut bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat serta pembangunan.

Masih dikatakan Warih, bahwa DPRD Kab Sidoarjo akan membuat Perda untuk memperkuat kemandirian dari Satpol PP. Kedepan Satpol PP dalam melakukan penegakan tidak perlu ijin atau koordinasi dengan OPD yang lain, sehingga kedepan mereka akan bisa gerak cepat, untuk melakukan pengawasan serta penegakan pelanggaran Perda. Termasuk menjamurnya pedagang rokok yang mangkal di tepi jalan dengan menggunakan kendaraan roda dua.tandasnya.

Warih juga mengharapkan sebelum melakukan tindakan terhadap UKM Rokok, petugas harus memberikan arahan serta pembinaan terlebih dahulu, sehingga mereka sadar akan pentingnya membuat rokok yang legal. Begitu juga toko kelontong juga harus diberi pengertian, sehingga mereka tidak melanggar aturan.





Hariyono Kepala Desa Sedati saat memberikan sambutan sebagai tuan rumah (nyo)

Secara terpisah Hariyono Kepala Desa Sedati menyampaikan pada koranrakyat, bahwa dirinya sangat berterima kasih pada Satpol PP, Beacukai maupun DPRD Kab Sidoarjo. Karena desa sedati diberi kesempatan jadi tempat untuk sosialisasi ketentuan Perundang Undangan Di bidang cukai dalam rangka pemberantasan peredaran rokok ilegal. Namun , menurut Kades bukan berarti diwilayah saya ada UKM yang membuat rokok, tapi menjadi kesempatan bagi warga kami untuk ikut menyosialisasikan. Kita Undang seluruh warga masyarakat diantaranya 5 RW dan 26 RT di sedati yang mewakili 8000 warga sedati dan saya berharap bisa ikut membantu sosialisasi selain itu PKK, tokoh masyarakat dan para pedagang kelontong agar mengetahui mana rokok yang menggunakan cukai palsu, atau yang resmi menggunakan cukai legal. (nyo/an)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Apresiasi Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai



Foto : Pemerintah Desa Sedati Agung bekerja sama dengan instansi terkait menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk "Gempur Rokok Ilegal" pada Rabu pagi, 10 Juli 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di pendopo kantor Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Apresiasi Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai

[SIDOARJO](#), [kasatmata.id](#) – Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, khususnya terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal, Pemerintah Desa Sedati Agung bekerja sama dengan instansi terkait menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk "Gempur Rokok Ilegal" pada Rabu pagi, 10 Juli 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di pendopo kantor Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.



Acara dihadiri Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo Warih Andono S.H, Anggota komisi A DPRD kabupaten Sidoarjo Muhammad Rafi Wibisono, Dua narasumber dari Bea Cukai kabupaten Sidoarjo Alexander Sico dan Aditya Budi beserta beberapa perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja serta puluhan warga yang hadir.

Pembukaan acara diawali sambutan dari Kepala Desa Sedati Agung Suhariyono, yang menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar.

"Sengaja dalam acara ini saya mengundang para ketua RT, RW, Ketua BPD dan beberapa pengusaha toko klontong. Intinya agar dari mereka bisa disosialisasikan kembali ke masyarakat luas, agar masyarakat lebih tau perbedaan dan dampak dari rokok ilegal dan rokok legal" sampai Suhariyono.

Selain itu adanya peredaran rokok tanpa cukai yang dijual dipasaran dengan harga sangat murah bisa merusak generasi, terutama anak dibawah umur karena harganya yang sangat murah dan sangat terjangkau oleh anak-anak.

"Maka dari itu pemerintah daerah bekerjasama dengan Bea Cukai untuk memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah kabupaten Sidoarjo. Bahkan jika di desa Sedati Agung ditemukan pedagang rokok tanpa cukai maka kami akan memberikan teguran namun jika sudah beberapa kali teguran tidak di respon maka akan ditindak tegas" tegas Suhariyono.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Dijelaskan pula oleh Kepala Desa Sedati Agung saat diruang kerjanya, bahwa pemerintah desa telah berencana membangun UMKM agar warganya bisa membuka usaha dan memperbaiki perekonomian lebih baik lagi.

Wakil Ketua Komisi A Warih Andono pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi sosialisasi yang digelar Bea Cukai dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terus berupaya melakukan operasi pasar dan pengawasan terpadu, mengadakan sosialisasi dan edukasi rutin kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendorong kesadaran hukum melalui media, seminar, dan kunjungan lapangan.

"DPRD mempunyai prinsip salah satunya pengawasan, membuat peraturan daerah yang didalamnya juga termasuk rokok ilegal, sehingga Satpol PP ini tidak menunggu rekom-rekom dari OPD lain, karena selama ini Satpol PP dalam menjalankan tugas sifatnya menunggu rekom dari dinas lain" jelas Warih.

Ditambahkan, tahun kedepan terkait tugas Satpol PP akan di bahas oleh DPRD kabupaten Sidoarjo, maka sifat Satpol PP akan lebih kuat lagi, mandiri, diberikan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan, penegakan Perda di Kabupaten Sidoarjo.

"Dikarenakan sebelumnya Satpol PP dalam fungsinya hanya sekedar sosialisasi tapi belum ada tindakan, Satpol PP baru ada tindakan jika ada rekomendasi dari Bea Cukai, jadi Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri. Maka kedepan kami dari DPRD membentuk Perda supaya memberikan kewenangan penuh pada Satpol PP" ujar anggota komisi A yang di usung dari partai Golkar.

Ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi A, bagaimana sosialisasi yang dilakukan bukan sekedar sosialisasi tapi bagaimana dengan rangka penindakannya. Hal ini disebabkan makin banyaknya pedagang rokok ilegal hampir di berbagai daerah di Sidoarjo, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil di pinggir-pinggir jalan.

"Peredaran rokok tanpa cukai yang makin marak ini berbahaya, mengapa rokok harus ada cukainya, rokok sebenarnya tidak sehat tapi jika ada cukainya minimal terkontrol tentang efek negatif dari penggunaan rokok tanpa cukai. Ada cukainya saja sudah tidak sehat apalagi tidak ada cukainya, karena kebanyakan yang membuat, mencipta bahkan yang pelaksana adalah home industry" imbuhnya.

"Pada kesempatan ini, bagaimana pemerintah daerah bisa menciptakan masyarakat bisa hidup sehat, sehingga dengan memberantas rokok tanpa cukai ini bisa membantu masyarakat dalam segala sisi positifnya" tegasnya.



Dua narasumber dari Bea Cukai kabupaten Sidoarjo Alexander Sico dan Aditya Budi pada akhir sesi memaparkan pengertian cukai yang telah di atur dalam Undang-Undang tentang cukai.



"Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007. Barang yang dikenakan cukai biasanya, konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi, karena dalam pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat/lingkungan hidup, Dalam pemakaiannya juga perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan" ungkapnya.

Adapun konsekuensi hukum

Menyalahgunakan fasilitas pembebasan cukai dan pelanggaran terhadap ketentuan cukai dapat dikenai sanksi administrasi (denda) maupun sanksi pidana.

Konsekuensi hukum bagi pelaku peredaran rokok ilegal, serta dampak negatif rokok ilegal (tanpa cukai) terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahaya peredaran rokok ilegal dan turut berperan aktif dalam pelaporannya kepada pihak berwenang.

Sosialisasi ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah desa, legislatif, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang tertib hukum dan bebas dari pelanggaran di bidang cukai.

Sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai menjadi langkah strategis untuk menekan peredaran barang ilegal, meningkatkan penerimaan negara, dan melindungi masyarakat. Semua pihak diharapkan berperan aktif dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib cukai. @dieft



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Gagal Pertahankan Runner up, Cabor Cabor Ngudal Roso Ke Komisi D



Sebenarnya apa yang salah dari gagalnya Kabupaten Sidoarjo di ajang Porprov 2025 ini ?

Ternyata banyak faktor yang menyebabkan kegagalan itu.

Diantaranya komunikasi yang kurang baik antara Cabor Cabor dengan jajaran pengurus KONI saat ini.

Mayoritas Cabor yang berlaga di Porprov 2025, menyebutnya seperti "anak ayam kehilangan induknya".



Ini tergambar jelas dari keluhan beberapa pengurus Cabor yang ada, saat mereka berdialog dalam wadah hearing dengan komisi D DPRD Sidoarjo, Kamis (9/7/2025).

Hearing yang diikuti seluruh pimpinan komisi D itu, menjadi ajang curhat bagi ketua Cabor akan kondisi prihatin mereka baik sebelum bertanding hingga usia Porprov digelar.

Seperti yang disampaikan ketua Cabor Wushu Nita Dariyanti, yang terang-terangan menyebut Cabor seperti tidak punya orang tua (KONI).

Bagaimana tidak, saat dirinya rela menepis tawaran 2x bonus ratusan juta untuk satu emas dari daerah lain dan lebih memilih bertahan untuk Sidoarjo, ternyata yang didapat malah Zong alias sikap acuh dari KONI Sidoarjo.

"Bahkan untuk sekelas konsumsi saja, kita baru dapat dana di hari keempat Porprov. Itupun anggarannya turun tidak sesuai pengajuan," ujar Nita.

Tidak hanya itu, menurut mantan atlet yang kini menjadi pengusaha catering ini, perhatian KONI akan dinamika lapangan di Porprov juga tidak ada bahkan cenderung tidak peduli.

Sehingga ketika diperlukan upaya lobi untuk mempertahankan kemenangan, tidak ada sama sekali suportnya dari KONI. Selain dari Cabor Wushu, keluhan serupa juga disampaikan dari Cabor Karate.

Bahkan Awan ketua Cabor karate secara tegas menyebutkan ketua KONI saat ini sangat sulit dihubungi dan terbilang pelit.

"Makanya kalau pilih ketua KONI yang mumpuni. The right man on the right place" ujar Awan.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Sementara itu Dedy ES ST,MT ketua Cabor Futsal Kabupaten Sidoarjo, mengaku untuk urusan komunikasi dengan KONI Sidoarjo, dirinya menyebut selama ini tidak ada persoalan yang signifikan.

Hanya saja, masalah yang krusial bagi Cabor, memang di anggaran yang terlambat turun untuk kebutuhan Cabor Cabor.

"Anggaran ini karena memang terlambat turunnya, sehingga menjadi masalah tersendiri bagi Cabor yang ada. Dan saya rasa terlambatnya anggaran ini tidak hanya kesalahan KONI saja," ulas Dedy.

Dedy juga menyatakan, minimnya dana TC untuk Cabor khususnya Futsal, juga menjadi hal yang mengganggu.

Seperti misalnya atlet Futsal di Sidoarjo ini, yang hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 450 ribu/bulan saja selama masa Training Center.

Padahal di daerah lain, atlet Futsal yang berlaga di Porprov, sudah bergaji Rp 2,5 juta/bulan.

"Belum lagi gaji pelatih yang dari tahun 2012 lalu tetap Rp 950 ribu/bulan. Ini sangat jauh dibanding gaji pelatih daerah lain yang sudah diatas Rp 4 juta/bulan. Padahal pelatih kita ini sudah AFC level 2 diatas pelatih daerah lain yang masih AFC level 1," ujar Dedy.

Akibatnya menurut Dedy, ketika ada pemain maupun pelatih yang diminati daerah lain dengan gaji yang memadai, pihaknya tidak bisa malarangnya kepindahannya.

Meski begitu untuk Futsal Putri di ajang Porprov 2025, berhasil menyumbangkan emas.

Ketua komisi D DPRD Sidoarjo H.Damroni Chudlori menyatakan seluruh keluhan dari Cabor ini, akan menjadi bahan untuk disampaikan ke bupati Sidoarjo

"Menjadi PR kita semua untuk bisa mencetak alit yang bagus dan mumpuni dengan menumbuhkan rasa memiliki Sidoarjo. Kalau saya boleh menyatakan, seharusnya pengurus KONI juga diisi oleh pengurus Cabor yang mendapatkan mendali," ujar Damroni. (Abidin)

